

SERAHKAN ALSINTAN RP1,6 MILIAR KEPADA KELOMPOK TANI, WALIKOTA BAUBAU YUSRAN FAHIM OPTIMISTIS BAUBAU MENUJU KEDAULATAN PANGAN DAERAH



BANTUAN ALSINTAN PRA-PANEN
SENILAI
RP1,6 MILIAR
DARI KEMENTERIAN PERTANIAN RI
TAHUN ANGGARAN 2026

**DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PENGAIRAN
REALISASI ANGGARAN RP2,6 MILIAR**
Jaringan irigasi air tanah, irigasi perpompaan,
dan dam parit melalui Balai Wilayah Sungai
Sulawesi Tenggara

**USULAN TAMBAHAN ANGGARAN
DISETUIJI SENILAI RP28 MILIAR**
Untuk pembangunan irigasi tersier dan
jaringan irigasi air tanah

**TOTAL DUKUNGAN DANA HIBAH
DARI PEMERINTAH PUSAT
RP30,2 MILIAR**

“ Dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat, kami optimistis Kota Baubau mampu mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi daerah yang mandiri. ”
— H. YUSRAN FAHIM, S.E.
Walikota Baubau



Hari ini Pemerintah Kota Baubau menerima stimulan yang luar biasa dari pemerintah pusat untuk mendorong produktivitas para petani kita. Nilai bantuan teknologi pertanian ini mencapai Rp1,6 miliar.
— H. YUSRAN FAHIM, S.E.
Walikota Baubau



- MANFAAT BANTUAN**
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian
- Mendukung petani secara bersama-sama dan berkelanjutan
- Memperluas indeks pertanaman dan ketahanan pangan
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

BERSAMA PETANI, MEMBANGUN BAUBAU UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Laporan: Prasetyo M , Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memperoleh dukungan pendanaan sekitar Rp30,2 miliar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperkuat sektor pertanian dan infrastruktur pengairan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan modernisasi pertanian sekaligus penguatan ketahanan pangan daerah yang selama ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah kota.

Dukungan tersebut diumumkan bersamaan dengan penyerahan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra-panen senilai Rp1,6 miliar kepada kelompok tani

penerima manfaat di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Minggu (21/6/2026). Bantuan diserahkan langsung oleh Wali

Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., didampingi Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc. Yusran Fahim menjelaskan, bantu-

an alsintan merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Pemerintah Kota Baubau dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada 9 Juni 2026. Menurut dia, dukungan pemerintah pusat tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas petani melalui pemanfaatan teknologi pertanian modern. “Hari ini Pemerintah Kota Baubau meneri-

ma stimulan yang luar biasa dari pemerintah pusat untuk mendorong produktivitas para petani kita. Nilai bantuan teknologi pertanian ini mencapai Rp1,6 miliar,” katanya.

Selain bantuan alsintan, Pemerintah Kota Baubau juga telah memperoleh realisasi anggaran pembangunan sara-

Lanjut ke Hal: 7

Siti Norma Adios Ajak Anggota DWP Jadi Garda Terdepan Cegah Stunting di Lapandewa, Edukasi Gizi Digencarkan



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton Selatan memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui kegiatan sosialisasi bagi para anggotanya di Desa Gaya Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas anggota agar mampu menjadi mitra pemerintah dalam membangun keluarga sehat dan mencegah stunting sejak dini.

Sosialisasi dihadiri Pembina DWP Kabupaten Buton Selatan, Ny. Hj. Siti Norma Adios, yang didampingi Ketua DWP Kabupaten Buton Selatan,

Ny. Wa Ode Dang Arafah Harwanto. Hadir pula Camat Lapandewa bersama jajaran pengurus dan anggota DWP Kabupaten Buton Selatan yang mengikuti rangkaian kegiatan edukatif tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ny. Hj. Siti Norma Adios menegaskan pentingnya peran organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat. “Pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk keluarga dan organisasi masyarakat yang mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Materi yang dis-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Alvin Akawijaya Serahkan Santunan Duka kepada 17 Ahli Waris dalam Momentum Tahun Baru Islam



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton menyalurkan santunan duka kepada 17 ahli waris warga yang meninggal dunia sebagai bagian dari program perlindungan sosial daerah.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, SH, dalam kegiatan Zikir Akbar dan Doa Bersama menyambut Tahun Baru Islam yang berlangsung di Aula

Kantor Bupati Buton, Senin (13/6/2026). Bupati Buton mengatakan program santunan kematian merupakan salah satu implementasi visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Serahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 kepada DPRD

Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 setelah dokumen tersebut secara resmi disampaikan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Buton Tengah, Senin (22/6/2026).

Penyampaian Rap-



erda tersebut menjadi tahapan penting dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Melalui proses itu, DPRD akan melakukan pembahasan terhadap realisasi pelaksanaan anggaran yang telah dijalank-

an pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Buton Tengah, Rusli. Kegiatan itu dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Buton Tengah Dr. Azhari, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Abdullah, para staf ahli,

asisten, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala bagian, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Dalam pidato penjabarannya, Bupati Azhari menegaskan bahwa penyampaian Raperda Pertanggung-

Lanjut ke Hal: 7

Serahkan Alsintan Rp1,6 Miliar kepada Kelompok Tani, Walikota Baubau Yusran Fahim Optimistis Baubau Menuju Kedaulatan Pangan Daerah

na pengairan sebesar Rp2,6 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan jaringan irigasi air tanah, irigasi perpompaan, dan dam parit yang dikerjakan melalui dukungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tenggara.

Tidak hanya itu, Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tenggara juga menyetujui usulan tambahan anggaran senilai Rp28 miliar untuk pembangunan jaringan irigasi tersier dan irigasi air tanah. Jika direalisasikan tahun ini, total dukungan yang berhasil diperoleh Pemerintah Kota Baubau dari pemerintah pusat akan mencapai sekitar Rp30,2 miliar.

Wali Kota Baubau meminta kelompok

tani memanfaatkan bantuan alsintan secara optimal melalui pola penggunaan bersama dan perawatan yang berkelanjutan. "Saya berharap seluruh kelompok tani dapat menjaga alat ini dengan baik, memanfaatkannya secara bergotong royong, serta menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian," ujarnya.

Menurut Yusran Fahim, modernisasi pertanian merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan sektor pangan yang semakin kompleks. Penggunaan teknologi pertanian diyakini mampu meningkatkan efisiensi produksi, memperluas

indeks pertanaman, serta memperkuat kesejahteraan petani di tengah perubahan iklim dan dinamika ekonomi global. "Bantuan ini harus menjadi pemicu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani," katanya.

Secara historis, modernisasi pertanian telah menjadi salah satu faktor utama peningkatan produksi pangan di berbagai negara. Di Indonesia, program Revolusi Hijau pada dekade 1970-an berhasil mendorong swasembada beras pada 1984 melalui penggunaan teknologi pertanian, benih unggul, dan pembangunan jaringan irigasi. Sementara itu,

sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Belanda berhasil meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui mekanisasi dan penerapan teknologi modern yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan air.

Yusran Fahim optimistis dukungan pemerintah pusat tersebut akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan pertanian Kota Baubau dalam jangka panjang. "Dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat, kami optimistis Kota Baubau mampu mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi daerah yang mandiri," tuturnya.*

Bupati Buton Alvin Akawijaya Serahkan Santunan Duka kepada 17 Ahli Waris dalam Momentum Tahun Baru Islam

yang sedang mengalami musibah. Menurut dia, kehadiran pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui bantuan sosial yang menyentuh kebutuhan warga.

"Saya berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan membantu keluarga kita yang sedang menghadapi keduakaan," kata Alvin Akawijaya Putra saat menyerahkan santunan kepada para ahli waris.

Sebanyak 17 penerima santunan berasal dari lima kecamatan, yakni tujuh orang dari Kecamatan Pasarwajo, enam orang dari Kecamatan Siotapina, dua orang dari Kecamatan Lasalimu, serta masing-masing satu orang dari Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Lasalimu Selatan. Setiap ahli waris menerima santunan sebesar Rp1 juta yang bersumber dari program Pemerintah Kabupaten Buton.

Dalam kesempatan itu, Alvin juga menyampaikan apresiasi kepada Pelaksana Tugas Kepala Ba-

gian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Buton yang dinilai berhasil mengawal pelaksanaan program santunan kematian. "Program ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk hadir di tengah masyarakat," ujarnya.

P e n y e r a h a n santunan turut disaksikan Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, ST, Ketua TP PKK Kabupaten Buton Ny. Maimunah Moko Syarifudin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton.

Secara historis, bantuan sosial bagi keluarga yang mengalami keduakaan telah menjadi bagian dari kebijakan kesejahteraan di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pusat sejak lama mengembangkan berbagai skema perlindungan sosial untuk mem-

bantu masyarakat menghadapi risiko sosial dan ekonomi, termasuk saat kehilangan anggota keluarga yang menjadi tulang punggung rumah tangga.

Di tingkat internasional, sejumlah negara juga menerapkan program serupa dalam bentuk death benefit atau survivor benefit yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial untuk mengurangi dampak ekonomi akibat peristiwa kematian dalam keluarga.

Melalui penyaluran santunan duka yang dirangkaikan dengan kegiatan keagamaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton berharap semangat solidaritas, kepedulian, dan gotong royong terus terpelihara di tengah masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pemerintah sebagai pelayan publik yang hadir dalam setiap situasi, termasuk saat warga menghadapi masa-masa sulit.*

Siti Norma Adios Ajak Anggota DWP Jadi Garda Terdepan Cegah Stunting di Lapandewa, Edukasi Gizi Digencarkan

ampaikan dalam sosialisasi mencakup pentingnya pemenuhan gizi seimbang, penerapan pola asuh yang tepat, serta pemantauan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga usia balita. Melalui pembekalan tersebut, anggota DWP diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di wilayahnya.

Ketua DWP Kabupaten Buton Selatan, Ny. Wa Ode Dang Arafah Harwanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah. "Kami ingin anggota DWP memili-

ki pemahaman yang memadai sehingga dapat berkontribusi nyata dalam upaya menurunkan angka stunting," katanya.

Secara historis, isu stunting telah menjadi perhatian dunia sejak komunitas internasional memasukkan perbaikan gizi ibu dan anak sebagai salah satu prioritas pembangunan berkelanjutan dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi pada 2015. Di Indonesia, percepatan penurunan stunting juga menjadi program strategis nasional melalui kolaborasi lintas sektor yang menitikberatkan pada intervensi gizi, kesehatan, sanitasi, dan edukasi

keluarga.

Camat Lapandewa yang turut hadir menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. "Kolaborasi pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan seperti DWP sangat penting untuk memperluas edukasi kepada masyarakat hingga tingkat desa," ujarnya.

Selain memperkuat pemahaman anggota, sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya berbagai inisiatif di tingkat keluarga dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan gizi anak serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak masa kehamilan.

"Upaya pencegahan akan lebih efektif jika dimulai dari lingkungan keluarga dan dilakukan secara berkesinambungan," ungkap salah seorang penyelenggara kegiatan.

Melalui kegiatan di Desa Gaya Makmur tersebut, DWP Kabupaten Buton Selatan menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kapasitas anggota diharapkan menjadi modal untuk mendukung terwujudnya masyarakat Buton Selatan yang sehat, sejahtera, dan bebas stunting.*

Bupati Buton Tengah Azhari Serahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 kepada DPRD

ngjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah yang harus disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

"Penyampaian dokumen ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilakukan

pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Azhari di hadapan peserta rapat paripurna.

Menurut dia, pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam

menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menjelaskan, seluruh laporan keuangan daerah yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual serta telah

diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

"Laporan keuangan daerah disusun secara terbuka, bertanggung jawab, dan berpedoman pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Azhari.

Bupati juga men-

yampaikan bahwa Raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tengah periode 2025-2029 yang menjadi arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

Dalam kesempatan itu, Azhari mengapresiasi dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini ikut mengawal pengelolaan keuangan daerah. Sinergi tersebut, menurutnya, berkontribusi terhadap keberhasilan Kabupaten Buton Tengah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sembilan kali berturut-turut.

"Capaian opini WTP ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Secara historis, opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui reformasi birokrasi, digitalisasi sistem keuangan, dan penguatan pengawasan internal. Sejumlah daerah di Indonesia menjadikan capaian WTP berkelanjutan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan fiskal dan administrasi pemerintahan.

Di tingkat internasional, prinsip akuntabilitas keuangan publik juga menjadi standar utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Organisasi seperti International Public Sector Accounting Standards Board (IP-SASB) dan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) mendorong

penerapan standar pelaporan keuangan yang transparan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara maupun pemerintah daerah.

P e m b a h a s a n Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan dilakukan DPRD sesuai mekanisme legislasi yang berlaku. Hasil pembahasan tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah.

"Kami berharap proses pembahasan berjalan konstruktif sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Azhari.*

Dasco Klaim Pemadaman Listrik Tak Terjadi Lagi, Pemerintah Perkuat Stabilitas Energi dan Ekonomi



Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik yang sempat terjadi di sejumlah daerah. Kepastian tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan pada Senin (22/6).

Menurut Dasco, hasil koordinasi lintas lembaga tersebut menghasilkan sejumlah langkah penyelesaian yang diyakini mampu mencegah terjadinya gangguan pasokan listrik dalam beberapa pekan mendatang. Ia menyebut berbagai persoalan yang menjadi pemicu gangguan listrik telah dibahas secara menyeluruh.

"Kita urai satu per satu sehingga insyaallah pemadaman listrik itu tidak akan terjadi lagi di minggu-minggu ini dan minggu ke depan," kata Dasco saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keandalan pasokan listrik nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya memperkuat sistem kelistrikan melalui pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, serta

peningkatan kapasitas cadangan energi di berbagai wilayah.

Selain membahas persoalan listrik, Dasco juga menyoroti tantangan ekonomi yang muncul akibat dinamika geopolitik global. Menurut dia, konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berupaya menjaga stabilitas sektor energi, tetapi juga memastikan iklim investasi tetap kondusif agar aktivitas ekonomi nasional tidak terganggu.

"Perang terhadap PHK yang karena efek dari perang global kemudian merambah ke negara kita. Perang bagaimana kita kemudian sama-sama menjaga supaya kepercayaan investor luar tetap terjaga," ujarnya.

Dasco menilai tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kepercayaan tersebut dinilai penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam kesempatan itu, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut juga menyoroti munculnya berbagai narasi yang menggambarkan kondisi Indonesia seolah-olah sedang berada dalam situasi krisis. Menurut dia, pandangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi nasional

yang sebenarnya.

"Tapi kemudian digoreng seolah-olah bahwa kita ini adalah negara yang sedang mengalami saat-saat keruntuhan, padahal tidak demikian," tegasnya.

Ia menambahkan, berbagai indikator ekonomi menunjukkan fundamental Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif kuat. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menjaga stabilitas fiskal sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional menghadapi tekanan eksternal.

Secara historis, Indonesia pernah menghadapi berbagai tantangan besar di sektor energi dan ekonomi. Pada krisis moneter 1997-1998, misalnya, gejala nilai tukar rupiah berdampak luas terhadap sektor industri dan ketenagakerjaan. Namun, perekonomian nasional secara bertahap mampu pulih melalui berbagai reformasi kebijakan.

Di sektor kelistrikan, salah satu peristiwa yang paling banyak mendapat perhatian publik terjadi pada Agustus 2019 ketika pemadaman listrik berskala besar melanda sebagian wilayah Pulau Jawa. Gangguan tersebut mendorong pemerintah dan PLN memperkuat sistem transmisi serta meningkatkan keandalan jaringan listrik nasional.

Sementara itu, secara internasional, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah selama beberapa dekade kerap memengaruhi harga energi global. Ketegangan yang melibatkan nega-

ra-negara produsen minyak sering kali berdampak pada kenaikan harga minyak dunia dan memicu ketidakpastian ekonomi di berbagai negara.

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas energi, ketahanan ekonomi, dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Langkah koordinasi lintas lembaga yang dilakukan saat ini dinilai menjadi bagian dari strategi untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari gejolak global.

Pada akhir sambutannya, Dasco menegajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan buruh, untuk memperkuat solidaritas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan ekonomi dunia.

"Saya minta kepada teman-teman buruh sekalian kita harus bersatu, kita harus kompak menjaga pemerintah, menjaga rakyat kita bersama-sama, menjaga kekompatan buruh untuk kesejahteraan kita semuanya," ujarnya.

Pemerintah berharap sinergi antara negara, pelaku usaha, dan pekerja dapat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas nasional. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis pasokan listrik tetap terjaga dan perekonomian Indonesia mampu menghadapi tekanan global yang terus berkembang. (*)

PDIP Pertanyakan Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode yang Diusung PSI



Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus merespons soal wacana Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjabat 2 periode yang digaungkan Partai Solidaritas

JAKARTA, BP- PDIP mempertanyakan wacana yang diusung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai peluang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. PDIP menilai pembahasan mengenai kontestasi politik lima tahun mendatang masih terlalu dini ketika pemerintah sedang menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Tanggapan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6). Menurut Deddy, prioritas seluruh elemen politik saat ini seharusnya diarahkan pada penyelesaian berbagai masalah masyarakat, mulai dari isu ekonomi, kesejahteraan hingga aspirasi yang disampaikan kelompok mahasiswa.

"Jawab dulu persoalan-persoalan masyarakat. Apakah ada tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa itu? Jangan langsung bicara Pemilu 2029," kata Deddy.

Ia menilai wacana pasangan Prabowo-Gibran dua periode yang terus digulirkan PSI lebih mencerminkan strategi komunikasi politik untuk menarik perhatian publik. Menurut dia, pola tersebut bukan hal baru dalam dinamika politik nasional.

Deddy berpendapat PSI kerap memanfaatkan isu yang sedang menjadi sorotan agar tetap berada dalam ruang percakapan publik. Dalam sejumlah momentum politik sebelumnya, PSI juga dinilai sering mengambil posisi yang berseberangan dengan PDIP sehingga memperoleh eksposur yang lebih luas.

"PSI cenderung begitu. Mereka tidak membesarkan partainya sendiri, tetapi sering

menumpang pada isu yang sedang ramai agar menjadi pembicaraan publik," ujarnya.

Lebih jauh, Deddy mempertanyakan asumsi bahwa Prabowo pasti bersedia kembali berpasangan dengan Gibran pada Pilpres mendatang. Menurut dia, keputusan politik semacam itu sepenuhnya berada di tangan Prabowo dan belum pernah diumumkan secara resmi.

"Pertanyaan saya, memang Pak Prabowo sudah pasti mau? Tanya dulu sebelum kampanye ke mana-mana," katanya.

Pernyataan Deddy merupakan respons atas keyakinan yang disampaikan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Dalam sebuah sinair politik yang ditayangkan pada pekan lalu, Ahmad Ali menyebut PSI tetap mendukung pasangan Prabowo-Gibran untuk kembali maju pada Pilpres 2029.

Menurut Ahmad Ali, hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda yang mengarah pada perpisahan politik antara Prabowo dan Gibran. Karena itu, PSI meyakini duet yang memenangkan Pilpres 2024 tersebut masih akan menjadi pilihan paling rasional pada pemilihan presiden berikutnya.

"Pilihan yang ada, kita mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Saya juga tidak yakin kalau Pak Prabowo tidak mengambil kembali Mas Gibran," ujar Ahmad Ali.

Ia juga menilai Gibran merupakan figur yang memiliki daya saing tinggi dibandingkan sejumlah nama yang diperkirakan masuk dalam bursa calon wakil presiden pada 2029. Menurut PSI, belum ada kandidat lain yang dianggap lebih menonjol daripada putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Secara historis, wacana pasangan presiden dan wakil presiden untuk dua periode bukan

hal baru dalam politik Indonesia. Sejak era reformasi, pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2004, namun pada periode kedua tahun 2009 pasangan tersebut tidak kembali bersama. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengalami perubahan pasangan pada periode kedua setelah berduet dengan Jusuf Kalla pada 2014 dan Ma'ruf Amin pada 2019.

Fenomena perubahan maupun keberlanjutan pasangan pemimpin juga terjadi di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, sejumlah presiden mempertahankan wakil presidennya untuk periode kedua guna menjaga stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan. Namun tidak sedikit pula yang memilih figur baru untuk menyesuaikan kebutuhan politik dan koalisi yang berkembang.

Pengamat menilai dinamika politik menjelang Pilpres biasanya mulai menghangat jauh sebelum tahapan resmi dimulai. Meski demikian, pembahasan mengenai konfigurasi pasangan calon umumnya baru mengerucut setelah partai-partai melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan perubahan peta kekuatan politik nasional.

Karena itu, perdebatan mengenai peluang Prabowo dan Gibran kembali berpasangan pada Pilpres 2029 diperkirakan masih akan terus berkembang. Di satu sisi, PSI menunjukkan dukungan penuh terhadap keberlanjutan duet tersebut. Di sisi lain, PDIP mengingatkan bahwa perhatian pemerintah dan partai politik saat ini seharusnya lebih difokuskan pada penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat daripada membicarakan kontestasi elektoral yang masih cukup jauh. (*)

TPID Kendari Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi Melalui Rakor Nasional



emerintah Kota Kendari melalui Tim Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat

Laporan: Mashuri

KENDARI, BP-Pemerintah Kota Kendari melalui Tim Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (22/6/2026).

Rakor yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi pengendalian inflasi di tengah dinamika harga kebutuhan pokok yang masih menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsu Tohir. Dari Kota Kendari, rakor diikuti jajaran TPID di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Kendari.

Dalam arahannya, Tomsu Tohir meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga dan memastikan ketersediaan pasokan tetap aman di pasaran.

"Pemerintah daerah harus terus melakukan pemantauan terhadap ko-

moditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga serta memastikan pasokan tetap tersedia untuk masyarakat," kata Tomsu Tohir dalam rakor tersebut.

Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga ditentukan oleh kecepatan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah antisipatif di lapangan.

Dalam forum tersebut, berbagai permasalahan kondisi inflasi nasional dan daerah dibahas secara komprehensif. Pemerintah pusat juga mengevaluasi efektivitas berbagai program yang telah dijalankan daerah dalam menjaga kestabilan harga pangan strategis.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan berbagai program intervensi yang memiliki dampak langsung terhadap harga pasar, termasuk operasi pasar murah, pengawasan distribusi barang, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

TPID Kota Kendari menyatakan siap mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga pasar secara rutin serta penguatan komunikasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait.

"Pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," demikian komitmen yang disampaikan TPID Kota Kendari dalam rakor tersebut.

Keikutsertaan TPID Kendari dalam rakor nasional ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadapi berbagai momentum yang berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok, termasuk perayaan hari besar keagamaan dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

"Koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar langkah pengendalian inflasi berjalan efektif dan tepat sasaran," ujar Tomsu Tohir.

Secara historis, pengendalian inflasi menjadi salah satu agenda utama pemerintah Indonesia sejak dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada 2008. Program ini terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga di tingkat daerah melalui sinergi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah.

Data nasional menunjukkan inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif terkendali dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GN-

PIP), operasi pasar, serta penguatan distribusi komoditas strategis.

Di tingkat global, pengendalian inflasi juga menjadi tantangan besar pasca-pandemi Covid-19 dan gejolak geopolitik dunia. Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa sempat mengalami lonjakan inflasi tertinggi dalam beberapa dekade akibat terganggunya rantai pasok dan kenaikan harga energi.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas moneter, serta pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat. Karena itu, forum koordinasi seperti rakor pengendalian inflasi dinilai strategis untuk memperkuat respons pemerintah terhadap potensi gejolak ekonomi di daerah.

Dengan penguatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Kendari berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, inflasi daerah dapat dikendalikan, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat seiring terjaganya pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. (*)

Pemkot Kendari Dorong Lulusan MA'HAD Jadi Generasi Berakhlak Mulia



Laporan: Lisna

KENDARI, BP-Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berintegritas. Komitmen tersebut disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kendari, Nismawati, saat membuka Wisuda Santri MA'HAD Umar Bin Khattab Angkatan 2023/2024 Tahun 2026 di Hotel Zahra Syariah Kendari, Senin (22/6/2026).

Menurut Nismawati, pendidikan keagamaan memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat di tengah dinamika perkembangan zaman.

"Pendidikan berbasis keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berkeadilan, serta memiliki pemahaman agama yang kuat sebagai bekal menghadapi tantangan kehidupan di masa depan," kata Nismawati dalam sambutannya.

Ia menilai, keberhasilan para santri menyelesaikan pendidikan di MA'HAD Umar Bin Khattab merupakan hasil sinergi antara peserta didik, orang tua, serta para ustaz dan ustazah yang selama ini memberikan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Nismawati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh santri yang berhasil menyelesaikan proses pendidikan. Ia berharap ilmu yang diperoleh

selama menempuh pendidikan dapat terus dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Lulusan MA'HAD diharapkan menjadi teladan di lingkungan keluarga dan masyarakat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai keislaman yang moderat, inklusif, dan penuh toleransi dalam kehidupan sosial. Menurutnya, peran generasi muda sangat dibutuhkan untuk menjaga harmoni sosial sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

"Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas, tetapi juga berintegritas dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi," katanya.

Kegiatan wisuda tersebut dihadiri para santri, orang tua, ustaz, ustazah, serta sejumlah tamu undangan. Prosesi berlangsung khidmat dan menjadi penanda berakhirnya masa pendidikan para santri pada jenjang yang telah ditempuh.

Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi akademik dan nonakademik, panitia memberikan penghargaan kepada sejumlah santri berprestasi. Pemberian apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri.

Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama yang melibatkan seluruh peserta wisuda, tenaga pendidik, keluarga santri, dan tamu undangan. Momen tersebut menjadi simbol dimulainya perjalanan baru para lulusan untuk melanjutkan pendidikan

maupun pengabdian di tengah masyarakat.

Secara historis, pendidikan berbasis pesantren dan lembaga keagamaan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan. Pesantren berperan besar dalam mencetak ulama, pemimpin masyarakat, hingga tokoh nasional yang berkontribusi dalam perjuangan bangsa dan pembangunan sosial.

Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan Islam terus berkembang di berbagai daerah sebagai pusat pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Keberadaan lembaga tersebut dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual.

Dalam konteks global, lembaga pendidikan berbasis agama juga berkembang di berbagai negara, termasuk Malaysia, Turki, Mesir, dan sejumlah negara Timur Tengah. Banyak institusi pendidikan Islam modern mengintegrasikan pembelajaran agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menjawab tantangan era globalisasi.

Wisuda Santri MA'HAD Umar Bin Khattab Tahun 2026 di Kendari menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta berkontribusi dalam pembangunan daerah, nasional, dan dunia internasional. (*)

TP-PKK Buton Tengah Perluas Program Jumat Berkah ke Lima Pesantren



Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton Tengah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat melalui program Jumat Berkah

Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton Tengah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat melalui program Jumat Berkah yang digelar di Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Jumat (19/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal sebelum program serupa diperluas ke sejumlah pondok pesantren lainnya di daerah itu.

Ketua TP-PKK Buton Tengah, Umi Noranah Azhari, mengatakan program Jumat Berkah dirancang sebagai wadah penguatan kepedulian sosial sekaligus sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang menempuh pendidikan di lingkungan pesantren.

"Kegiatan ini terlaksana berkat kebersamaan keluarga besar TP-PKK, BKMT, dan Dekranasda yang membawa semangat berbagi," kata Umi Noranah Azhari dalam sambutannya.

Kegiatan yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Munawwarah tersebut dihadiri oleh Staf Ahli PKK Kartini Adam Basan, pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranas-

da), sejumlah kepala organisasi perangat daerah, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Dalam pelaksanaannya, TP-PKK menggandeng Puskesmas One Waara untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para santri dan masyarakat yang hadir. Pemeriksaan tersebut meliputi layanan kesehatan dasar sebagai bentuk deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan.

Selain layanan kesehatan, para santri juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat melalui kegiatan demonstrasi memasak sarapan praktis bergizi. Program ini bertujuan menanamkan kebiasaan mengonsumsi makanan sehat yang mudah disiapkan dengan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar.

Menurut Umi Noranah, edukasi gizi menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Karena itu, TP-PKK berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran bahwa kesehatan dan gizi merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas," ujarnya.

Ia mengungkapkan,

program Jumat Berkah tidak akan berhenti di Pondok Pesantren Al-Munawwarah. TP-PKK Buton Tengah telah menyusun agenda lanjutan yang akan menasar empat pondok pesantren lainnya di wilayah Kabupaten Buton Tengah.

"Kami juga merencanakan khitanan massal dan pemeriksaan kesehatan lanjutan di Puskesmas Wadiabero sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan kepada masyarakat," katanya.

Secara historis, gerakan pemberdayaan keluarga melalui PKK telah menjadi salah satu instrumen pembangunan sosial di Indonesia sejak dibentuk pada awal dekade 1970-an. Berbagai program PKK selama lebih dari lima dekade berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, hingga penguatan ekonomi rumah tangga.

Di tingkat nasional, perhatian terhadap perbaikan gizi masyarakat terus menjadi agenda strategis pemerintah. Berdasarkan berbagai program kesehatan nasional, edukasi konsumsi makanan bergizi dan pencegahan masalah gizi menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Generasi Emas 2045.

Sementara itu, secara internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan

dan Pertanian Dunia (FAO) selama bertahun-tahun mendorong negara-negara untuk memperkuat edukasi gizi sejak usia dini. Pendekatan berbasis komunitas seperti yang dilakukan melalui sekolah, pesantren, dan organisasi masyarakat dinilai efektif dalam membangun perilaku hidup sehat secara berkelanjutan.

Staf Ahli PKK, Kartini Adam Basan, mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara organisasi perempuan, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama dalam memperluas manfaat program sosial kemasayarakatan.

"Kebersamaan dan kolaborasi lintas sektor menjadi modal penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing," ujarnya.

Melalui program Jumat Berkah, TP-PKK Buton Tengah berharap budaya gotong royong dan semangat berbagi dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Dukungan berbagai elemen daerah dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.*

Tahun Baru Islam 1448 H, Bupati Buton Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pengabdian



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah/2026 Masehi dengan menggelar Zikir dan Doa Bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Senin (15/6/2026). Momentum pergantian tahun Hijriah itu dimanfaatkan untuk memperkuat nilai spiritual sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur dalam melayani masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Buton tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan Program Santunan Kematian kepada 17 penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang membutuhkan.

Dalam sambutannya, Bupati Alvin menegaskan bahwa Tahun Baru Islam bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat.

"Menjelang Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, selain kita beribadah dan berdoa kepada Allah SWT, juga harus diimbangi dengan usaha atau ikhtiar yang merupakan hal penting bagi kita semua dalam menjalankan tugas," kata Alvin.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam bekerja secara profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Karena itu, Bupati mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buton untuk menjadikan Tahun Baru Islam sebagai titik awal meningkatkan

etos kerja dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan.

"Saya berharap kita dapat tanamkan ke dalam diri kita semua untuk terus berusaha, bekerja secara profesional, dan meningkatkan kinerjanya," ujarnya.

Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, S.T. bersama Ibu Maemuna Moko Syarifudin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton, serta tokoh agama dan masyarakat.

Dalam tausiah yang disampaikan pada kesempatan itu, Ustaz Sahrul, S.H., mengingatkan bahwa seluruh nikmat yang dimiliki manusia, baik kesehatan, harta maupun jabatan, merupakan anugerah Allah SWT yang wajib disyukuri melalui tindakan nyata.

"Rasa syukur tidak hanya diwujudkan melalui ucapan, tetapi juga melalui ketaatan kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya," tutur Ustaz Sahrul di hadapan jamaah.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk membiasakan diri berdzikir dan mengawali setiap aktivitas dengan mengucapkan basmalah agar pekerjaan yang dilakukan memperoleh keberkahan serta perlindungan dari Allah SWT.

"Mari kita jadikan wirid dan dzikir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Awali setiap pekerjaan dengan mengucapkan bismillah agar apa yang kita lakukan menjadi berkah dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT," pesannya.

Pelaksanaan zikir dan doa bersama berlangsung khidmat. Para peserta mengikuti rang-

kaian kegiatan dengan penuh kekhayalan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan waktu sekaligus harapan untuk memperoleh keberkahan pada tahun yang baru.

Secara historis, kalender Hijriah mulai digunakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 638 Masehi. Penetapan tahun Hijriah dihitung berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan peradaban Islam. Sejak saat itu, kalender Hijriah digunakan oleh umat Islam di berbagai negara sebagai acuan pelaksanaan ibadah dan berbagai aktivitas keagamaan.

Di Indonesia, peringatan Tahun Baru Islam telah menjadi tradisi yang berlangsung selama puluhan tahun. Berbagai daerah menggelar kegiatan keagamaan seperti doa bersama, pawai obor, pengajian, hingga santunan sosial sebagai wujud syukur dan refleksi atas perjalanan kehidupan. Tradisi tersebut juga menjadi sarana mempererat persatuan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Pada tingkat global, Tahun Baru Islam diperingati oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia, mulai dari Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika hingga Eropa dan Amerika. Meski bentuk peringatannya beragam sesuai budaya masing-masing negara, esensinya tetap sama, yakni memperkuat keimanan, meningkatkan ketakwaan, serta melakukan evaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Melalui kegiatan zikir dan doa bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton berharap semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dapat menjadi energi positif bagi seluruh aparatur dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan beragama, memperkuat kebersamaan, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.*

BPOM Percepat Legalitas UMKM Pangan Melalui Program GASPOL SI JEMPOL



Laporan: Ardi

SURABAYA, BP- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meluncurkan rangkaian Bulan Keamanan Pangan 2026 sekaligus mempercepat proses legalitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Gerakan Sosialisasi dan Pendampingan Registrasi Produk dan Sertifikasi Sarana Produksi Pangan Olahan (GASPOL SI JEMPOL) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day/WFSD) 2026.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, penguatan keamanan pangan harus menjadi agenda bersama karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, produktivitas nasional, dan daya saing industri pangan Indonesia. Melalui pendekatan jemput bola, BPOM memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM agar proses registrasi produk dan sertifikasi sarana produksi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

"Pangan yang aman merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing,"

kata Taruna Ikrar saat membuka kegiatan tersebut.

Pada kesempatan itu, BPOM menyerahkan secara simbolis enam Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan, satu Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMKM susu pasteurisasi pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta satu Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) proaktif bagi pelaku usaha pangan olahan non-risiko tinggi.

Selain mendukung pelaku usaha di dalam negeri, BPOM juga memperkuat akses produk pangan Indonesia ke pasar internasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan sertifikat bebas kontaminasi cesium-137 sebagai syarat ekspor rempah ke Amerika Serikat. Kewenangan tersebut diperoleh setelah BPOM ditunjuk oleh United States Food and Drug Administration (USFDA) sebagai Certifying Entity untuk rempah pada 31 Oktober 2025.

"Penunjukan tersebut menjadi pengakuan internasional atas kapasitas dan kredibilitas sistem pengawasan pangan Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap mutu dan keamanan produk pangan nasional di

pasar global," ujar Taruna Ikrar.

Dalam acara yang sama, BPOM menyerahkan tiga Shipment Specific Certificate (SSC) kepada perusahaan eksportir rempah. Penyerahan itu sekaligus menandai penerbitan SSC ke-500 sejak BPOM mendapatkan mandat sebagai lembaga sertifikasi ekspor rempah untuk pasar Amerika Serikat.

Tema WFSD 2026, yakni 'From Burden to Solutions' 'Safe Food Everywhere' atau 'Dari Beban Menjadi Solusi' "Pangan Aman di Mana Saja", menegaskan bahwa keamanan pangan masih menjadi tantangan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 600 juta orang di dunia jatuh sakit setiap tahun akibat pangan yang terkontaminasi, sementara sekitar 420 ribu orang meninggal karena penyakit bawaan pangan (foodborne diseases).

Di Indonesia, penguatan sistem keamanan pangan terus menjadi prioritas pemerintah. Sejak WFSD pertama kali diperingati secara global pada 2019 atas inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berbagai program edukasi, pengawasan, dan sertifikasi pangan terus diperluas guna meningkatkan kon-

sumen sekaligus memperkuat daya saing produk nasional.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pelaku usaha, melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pangan, mulai dari produsen, distributor, akademisi, media, hingga masyarakat sebagai konsumen.

"Melalui kolaborasi yang kuat, penerapan praktik keamanan pangan yang baik, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat mewujudkan pangan yang aman di setiap tahap rantai pangan," katanya.

Melalui Bulan Keamanan Pangan 2026 yang mengusung semangat "Pangan Berkualitas, Pasar Tanpa Batas", BPOM berharap semakin banyak UMKM pangan olahan yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun global serta berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan nasional.

"Kolaborasi yang kuat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem pangan yang aman, bermutu, berdaya saing, dan berkelanjutan," ujar Taruna Ikrar.*

Menkes Dorong Buruh Rutin Periksa Kesehatan untuk Tekan Risiko Penyakit Kronis



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendorong masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan buruh, memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular yang selama ini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat peluncuran CKG di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polri dan kegiatan Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-80 di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Lemdiklat Polri, Jakarta, Selasa (23/6).

Pada kesempatan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Bakti Kesehatan Polri Tahun 2026 telah berlangsung secara serentak sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2026 di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 5.354 tenaga kesehatan dan telah memberikan lebih dari 664 ribu layanan kesehatan kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan umum dan spesialis, operasi katarak, operasi bibir sumbing, donor darah, pemeriksaan laboratorium, skrining stunting, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pelayanan tuberkulosis (TB).

Dalam rangkaian kegiatan itu, Polri juga meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh yang ditujukan untuk memudahkan pekerja memperoleh akses layanan keseha-

tan melalui jaringan rumah sakit Polri di berbagai daerah. "Kartu ini diharapkan dapat mempermudah rekan-rekan buruh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan Polri di seluruh Indonesia," kata Listyo Sigit Prabowo.

Menkes Budi menegaskan bahwa penyakit seperti stroke, penyakit jantung, kanker, dan gagal ginjal sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Menurut dia, program CKG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto harus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

"Penyakit seperti stroke, jantung, dan ginjal sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dari Presiden Prabowo harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Ia menjelaskan terdapat empat indikator kesehatan yang perlu menjadi perhatian masyarakat, yakni tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan obesitas. Menurut Menkes, tekanan darah ideal berada di bawah 120/80 mmHg, kadar gula darah tidak melebihi 200 mg/dL, serta kolesterol harus dijaga di bawah 200 mg/dL. "Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan angka di atas normal, jangan dianggap enteng meskipun merasa sehat. Segera datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan

penanganan," katanya.

Secara historis, penyakit tidak menular terus mendominasi penyebab kematian di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan stroke dan penyakit jantung konsisten menjadi penyebab kematian tertinggi, seiring meningkatnya prevalensi hipertensi, diabetes, dan obesitas. Tren serupa juga terjadi secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 74 persen kematian di dunia setiap tahun disebabkan oleh penyakit tidak menular, terutama penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambut positif kolaborasi antara Polri dan serikat pekerja dalam menghadirkan program kesehatan bagi buruh. Menurutnya, dukungan layanan kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi pekerja dan keluarganya, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Peluncuran Cek Kesehatan Gratis di FKTP Polri bersama Bakti Kesehatan Polri menandai penguatan upaya promotif dan preventif pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan. Melalui deteksi dini dan pemeriksaan berkala, pemerintah berharap angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kronis dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.*

PT FAREN GRAFIKA



KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak: Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kapolri Tegaskan Nasib Penahanan Roy Suryo dan Tifa di Tangan Jaksa



Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma kini menjadi wewenang Kejaksaan setelah pelimpahan kasus.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa keputusan terkait penahanan atau penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) dalam kasus dugaan penyebaran informasi palsu mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan. Penegasan itu disampaikan setelah proses pelimpahan tahap II dari Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah selesai dilaksanakan.

Pernyataan Kapolri tersebut muncul menyusul keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka setelah menerima berkas perkara, barang bukti, dan terduga dari penyidik pada Senin (22/6).

Menurut Sigit, seluruh kewajiban Polri dalam penanganan perkara telah dituntaskan melalui mekanisme tahap II sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana.

"Terkait penangguhan penahanan Roy Suryo yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2," kata Sigit kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6).

Ia menjelaskan, sejak berkas dan tersangka diserahkan kepada jaksa penuntut umum, kewenangan mengenai

penahanan tidak lagi berada pada institusi kepolisian.

"Tentunya kewajiban kami sudah selesai, penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi Kejaksaan jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana," ujar Kapolri.

Keputusan tidak dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa sebelumnya diumumkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah. Ia menyatakan langkah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

"Sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," kata Marcelo.

Marcelo menjelaskan, salah satu dasar pertimbangan jaksa adalah adanya surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga serta kuasa hukum kedua tersangka kepada jaksa penuntut umum.

Perkara yang kini memasuki tahap penuntutan tersebut bermula dari laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah dan penyebaran informasi palsu mengenai keaslian ijazah perguruan tingginya yang beredar melalui media sosial.

Dalam perkembangan penyidikan,

Polda Metro Jaya sempat menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster perkara. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan penghasutan yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Namun, status tersangka pada klaster pertama kemudian dihentikan setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, proses hukum terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa pada klaster kedua tetap berlanjut hingga tahap pelimpahan ke kejaksaan.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait dugaan manipulasi dokumen elektronik. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencemaran nama baik.

Berdasarkan ketentuan yang disangkakan, Roy Suryo dan dr. Tifa menghadapi ancaman pidana maksimal enam tahun penjara apabila nantinya terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara histo-

ris, perkara yang melibatkan dugaan penyebaran informasi elektronik dan pencemaran nama baik menjadi salah satu jenis kasus yang cukup menonjol dalam penegakan hukum Indonesia sejak diberlakukannya UU ITE pada 2008. Sejumlah perkara serupa pernah menarik perhatian publik karena menyangkut tokoh politik, pejabat negara, maupun figur publik yang memiliki pengaruh besar di ruang digital.

Di tingkat internasional, berbagai negara juga menghadapi tantangan serupa terkait penyebaran disinformasi dan konten yang dinilai merugikan reputasi seseorang melalui media elektronik. Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga sejumlah negara Uni Eropa dalam satu dekade terakhir memperkuat regulasi digital guna menekan penyebaran informasi palsu dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan platform media sosial.

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr. Tifa kini memasuki fase penuntutan di bawah kewenangan kejaksaan. Publik menantikan perkembangan berikutnya, termasuk penyusunan surat dakwaan serta proses persidangan yang akan menentukan arah akhir perkara tersebut di pengadilan. (*)

Roy Suryo dan Dokter Tifa Tolak Praperadilan, Fokus Hadapi Persidangan



Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa, Ahmad Khozinudin menyatakan pihaknya tidak akan mengajukan praperadilan dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa memutuskan tidak mengajukan praperadilan terkait perkara yang berhubungan dengan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Keduanya memilih membawa perkara tersebut ke tahap persidangan agar substansi kasus dapat diperiksa secara menyeluruh oleh majelis hakim.

Keputusan itu disampaikan kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, Ahmad Khozinudin, setelah proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selesai dilakukan pada Senin (22/6). Saat ini, tim kuasa hukum menyatakan fokus utama mereka adalah menghadapi agenda persidangan yang direncanakan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurut Khozinudin, langkah tidak mengajukan praperadilan diambil karena pihaknya menginginkan perkara masuk ke pokok pemeriksaan dan tidak berhenti pada aspek prosedural semata. Dengan demikian, seluruh materi yang menjadi perdebatan dapat diuji secara terbuka di pengadilan.

"Kami tidak mengambil upaya itu karena kami sebenarnya berkepentingan untuk masuk ke pokok perkara," kata Khozinudin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6).

Ia menilai, apabila praperadilan diajukan dan dikabulkan, perkara berpotensi berakhir sebelum substansi persoalan diperiksa secara menyeluruh oleh majelis hakim. Oleh karena itu, pihaknya memilih menunggu proses persidangan dan menyampaikan seluruh argu-

mentasi hukum dalam forum peradilan.

"Jika peradilan diajukan dan kemudian dikabulkan, akhirnya perkara ini gugur sebelum masuk ke pokok perkara," ujar Khozinudin.

Di sisi lain, persoalan penahanan yang sebelumnya menjadi perhatian tim kuasa hukum kini dinilai telah selesai. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa setelah menerima pelimpahan berkas perkara dan tersangka dari penyidik.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan itu sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan penahanan kedua tersangka selama menunggu proses persidangan.

"Sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," kata Marcelo.

Dengan tidak adanya penahanan, tim kuasa hukum menyatakan dapat lebih leluasa mempersiapkan pembelaan. Mereka juga menegaskan kesiapan menghadapi proses persidangan yang akan menjadi arena utama pengujian fakta dan argumentasi hukum dari masing-masing pihak.

"Yang paling penting kami bisa berkonsentrasi menghadapi proses hukum di pengadilan," ujar Khozinudin.

Secara historis, praperadilan merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sejak 1981. Mekanisme tersebut dirancang untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan oleh aparat penegak hukum. Dalam prakti-

knya, sejumlah perkara besar di Indonesia pernah menggunakan jalur praperadilan sebagai upaya hukum sebelum memasuki pokok perkara.

Beberapa kasus nasional yang sempat menyita perhatian publik melalui mekanisme praperadilan antara lain perkara mantan Komjen Pol Budi Gunawan pada 2015, yang menghasilkan putusan penting terkait status tersangka. Selain itu, sejumlah perkara korupsi dan tindak pidana umum juga kerap memanfaatkan jalur tersebut untuk menguji prosedur penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Dalam konteks internasional, sejumlah negara juga mengenal mekanisme serupa untuk menguji legalitas tindakan aparat sebelum perkara masuk ke tahap persidangan. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat proses judicial review terhadap tindakan penegak hukum, sedangkan di beberapa negara Eropa dikenal mekanisme preliminary hearing yang berfungsi menyaring aspek prosedural sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.

Pengamat hukum menilai pilihan untuk tidak mengajukan praperadilan merupakan strategi yang sah dalam sistem peradilan pidana. Dengan strategi tersebut, para pihak dapat langsung mengarahkan energi dan sumber daya pada pembuktian materi perkara di hadapan majelis hakim.

Perkembangan kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa kini memasuki fase baru setelah berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Publik menanti proses persidangan yang akan menentukan arah penyelesaian perkara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (*)

Wali Kota dan Wawali Baubau Dampingi Kafilah MTQ XXXI Sultra di Konawe, Targetkan Prestasi



Laporan: Prasetyo M

KONAWA, BP-Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya dalam pengembangan generasi Qurani dengan mengirimkan 47 peserta pada Musabaqah Tilawatil Qur'ān (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Konawe. Total rombongan yang dibawa mencapai sekitar 86 orang, termasuk pelatih dan pendamping.

Kehadiran Kafilah Kota Baubau di Konawe sekaligus disertai dengan penyambutan dan peninjauan langsung oleh Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., serta Ketua TP PKK Kota Baubau Hj. Siti Aryati Yusran di depan Kantor Bupati Konawe, Unaha, Selasa (23/06/2026).

Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu menyebutkan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta sebelum mengikuti seluruh rangkaian lomba MTQ tingkat provinsi.

"Kami hadir langsung untuk melihat kondisi kafilah dan memastikan mereka siap secara mental, fisik, dan teknis menghadapi lomba," ujarnya.

Sebelumnya, para peserta telah tiba lebih awal di Konawe, sekitar tiga hari sebelum pembukaan, untuk melakukan adaptasi lingkungan dan pemantapan latihan.

Pembukaan MTQ XXXI Sulawesi Tenggara dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni 2026 dan akan berakhir pada 28 Juni 2026 dengan berbagai cabang lomba tilawah, tahfiz, tafsir, hingga seni baca Al-Quran.

Pada malam sebelum pembukaan, para kafilah dari 17 kabupaten/kota mengikuti malam ta'aruf di Rumah Jabatan Bupati Konawe sebagai ajang silaturahmi sekaligus pengambil sumpah dewan hakim.

"Alhamdulillah, seluruh peserta dalam kondisi sehat dan siap bertanding. Ini menjadi modal penting bagi kita," kata Wa Ode Hamsinah Bolu.

Dalam kesempatan tersebut, Pemer-

intah Kota Baubau juga menurunkan kontingen dalam kegiatan Pawai Ta'aruf dengan menampilkan mobil hias yang menjadi salah satu unsur penilaian dalam rangkaian MTQ. "Mobil hias kita tampilkan sebagai bentuk kreativitas sekaligus syiar Islam di tingkat provinsi," tambahnya.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim menegaskan bahwa keikutsertaan dalam MTQ bukan semata mengejar juara, tetapi juga bagian dari pembinaan karakter generasi muda.

"Kami berharap peserta dapat tampil maksimal, menjaga sportivitas, dan membawa nama baik Kota Baubau," ucapnya.

Ketua TP PKK Kota Baubau Hj. Siti Aryati Yusran juga memberikan dukungan moral kepada peserta agar tetap percaya diri dalam menghadapi kompetisi.

MTQ sendiri memiliki sejarah panjang di Indonesia. Ajang ini pertama kali digelar secara nasional pada 1968 di Makassar, dan sejak itu berkembang menjadi agenda rutin

nasional yang memperkuat syiar Islam serta pembinaan qari dan qariah di seluruh daerah.

Di tingkat internasional, kompetisi tilawatil Quran juga telah berkembang, seperti Dubai International Holy Quran Award yang dimulai pada 1998 dan menjadi salah satu ajang paling bergengsi di dunia Islam.

Partisipasi Baubau dalam MTQ Sultra tahun ini diharapkan dapat melanjutkan tradisi prestasi daerah sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu wilayah dengan pembinaan qari terbaik di Indonesia.

Selain target prestasi, Pemerintah Kota Baubau menekankan pentingnya nilai-nilai pembinaan karakter, disiplin, dan akhlak mulia yang menjadi tujuan utama dari kegiatan MTQ.

Dengan semangat tersebut, kafilah Baubau diharapkan mampu bersaing secara sehat dan membawa hasil terbaik bagi daerah.*

Camat Betoambari Dampingi Penilaian Lomba KEDAI di Lima Kelurahan, KEDAI Jadi Model Kemandirian Pangan Keluarga di Kota Baubau



Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Pemerintah Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, memperkuat komitmen ketahanan pangan keluarga melalui Program Kebun Dapur Ibu (KEDAI) yang memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan mandiri.

Kegiatan tersebut ditandai dengan pendampingan langsung oleh Camat Betoambari, Edward Sanjaya, dalam agenda penilaian Lomba Pemanfaatan Pekarangan KEDAI yang dilaksanakan pada Senin (22/6/2026).

Program ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Baubau dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis rumah tangga sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya kaum ibu.

Dalam pelaksanaannya, tim penilai melakukan peninjauan di lima Kelurahan di wilayah Kecamatan Betoambari untuk melihat langsung pemanfaatan lahan pekarangan sebagai kebun pangan keluarga.

Edward Sanjaya menegaskan bahwa pemerintah kecamatan bersama kelurahan berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh proses penilaian berjalan optimal dan terarah.

"Selama proses penilaian berlangsung, kami memastikan seluruh unsur kecamatan dan kelurahan bersinergi mendampingi kelompok KEDAI," ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi lintas perangkat wilayah menjadi kunci agar program tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat.

"Langkah ini penting agar pelaksanaan lomba berjalan lancar dan mampu mencapai target yang kita harapkan bersama," kata Edward.

Program KEDAI sendiri tidak hanya diposisikan sebagai lomba, melainkan sebagai gerakan sosial untuk mengoptimalkan lahan pekarangan rumah agar lebih produktif.

Menurut Edward, pendekatan ini mendorong masyarakat untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan dari lingkungan sendiri, mulai dari sayuran, tanaman obat, hingga kebutuhan dapur harian.

"Ini bukan sekadar kompetisi, tetapi gerakan bersama untuk membangun kemandirian pangan keluarga," ujarnya dalam keterangan terpisah.

Dari sisi ekonomi, pemanfaatan pekarangan dinilai mampu menekan pengeluaran rumah tangga sekaligus membantu stabilitas harga pangan

di tingkat lokal yang berkaitan dengan inflasi daerah.

Secara historis, konsep pemanfaatan lahan pekarangan bukan hal baru di Indonesia. Kementerian Pertanian sejak awal 2010-an telah mengembangkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai bentuk penguatan pangan berbasis keluarga.

Di tingkat global, gerakan serupa pernah dikenal dengan istilah 'victory garden' di Amerika Serikat dan Eropa pada masa Perang Dunia II, ketika masyarakat didorong menanam pangan sendiri untuk mengurangi tekanan rantai pasok.

Edward menyebut bahwa semangat serupa kini kembali relevan di tengah tantangan ketahanan pangan global dan fluktuasi harga bahan pokok.

"Kami optimistis melalui KEDAI, masyarakat Betoambari dapat membangun lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan tangguh pangan," katanya.

Pemerintah Kecamatan Betoambari berharap program ini dapat menjadi model berkelanjutan dalam memperkuat kemandirian pangan keluarga di Kota Baubau, sekaligus memperluas dampaknya ke wilayah lain.*